



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



RSUD I LAGALIGO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2026.

Rumah sakit adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan rujukan yang mencakup multi disiplin ilmu dan tenaga kerja, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang berubah tersebut.

Renja Tahun 2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, saat menyusun renja ini masih berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2026. Namun saat ini tengah berlangsung proses penyusunan Renstra baru periode 2025-2029 dan penyusunan renja 2026 tetap memperhitungkan rencana strategis baru yang sedang disusun.

Tak lupa kami ucapan terima kasih kepada semuapihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.



dr. IRFAN, Sp.PK
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 1976010120060410034

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra RSUD I Lagaligo.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD I Lagaligo	10
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	20
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD I Lagaligo.....	21
3.3 Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	30
BAB IV PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra.....	7
Tabel	2.2	Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
Tabel	2.3	Cakupan Pelayanan RSUD I Lagaligo berdasarkan cara Pembayarannya.....	14
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	16
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Renja RSUD I Lagaligo Tahun 2025.....	22
Tabel	3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD I Lagaligo Tahun 2025	25
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD I Lagaligo.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo merupakan organisasi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program Pembangunan Kesehatan yang mengacu pada RPJPD dan RPJMD, dan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah dalam penyusunan rencana juga memperhatikan rancangan Renstrada dan RPJMD periode 2025 – 2029 yang sedang disusul.

Sebagai unit pelayanan publik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan visi yang dimiliki RSUD I Lagaligo yaitu **“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Dengan Pelayanan Profesional Dan Bermutu”**. Konsekuensinya bagi RSUD I Lagaligo yang menerapkan PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat/ pasien. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan – pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini

sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Dan dengan diterapkannya PPK-BLUD diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) RSUD I Lagaligo memuat arah kebijakan pembangunan pelayanan kesehatan, prioritas pembangunan, program SKPD sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran rumah sakit tahun anggaran 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Renja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan banyak manfaat baik pemerintah maupun mitra kerja.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, landasan hukum yang dijadikan acuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 1312);
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2008-2028;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA.2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9)
18. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 259/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) pada RSUD I Lagaligo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan dilingkungan RSUD I Lagaligo tahun 2026 sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja RSUD I Lagaligo Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman bagi RSUD I Lagaligo dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Daerah pada T.A 2026.
2. Menjadi acuan bagi RSUD I Lagaligo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) T.A 2026 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dirumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
3. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sector maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kerja Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah yang lalu dan capaian Renstra perangkat daerah mengacu pada APBD tahun lalu juga memuat analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RSUD I Lagaligo 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Strategis RSUD I Lagaligo Tahun 2021-2026 dan memperhatikan rancangan RPJMD periode 2025-2029. Saat ini RSUD I Lagaligo sedang dalam proses penyusunan renstra baru sehubungan dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2025-2029.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD I Lagaligo

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana. Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD I Lagaligo tahun 2025. Realisasi semester I Tahun 2025 sebagai awal periode Renstra RSUD I Lagaligo.

Review hasil evaluasi pelaksanaan renja RSUD I Lagaligo semester I tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD. Pada tahun 2025 RSUD I Lagaligo melaksanakan 3 (tiga) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Total pagu anggaran RSUD I Lagaligo tahun 2025 adalah Rp. 207.339.599.037,- dengan Realisasi total sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.61.167.151.163,- (29,5%). Untuk lebih jelasnya kinerja RSUD I Lagaligo pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini.

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
RSUD I LAGALIGO KAB. LUWU TIMUR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2021 (n- 5)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2022 (n-4)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2023 (n- 3)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2024 (n-2)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PDTW.II 2025		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab 11	
					5	K Rp	6	K Rp	7	K Rp	8	K Rp	9	K Rp		
1	2	3	4													
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	658.721.662.802	100 %	129.146.130.200	100 %	124.026.487.722	100 %	120.717.846.986	100 %	121.717.279.133	68,4 %	59.296.325.746	
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Perentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100 %	198.555.300	100 %	1.755.651.313	100 %	25.850.300	100 %	51.017.200	100 %	60.857.050	100 %	11.684.000	
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100 %	146.075.138.687	100 %	25.814.282.287	100 %	27.965.053.562	100 %	29.242.733.109	100 %	40.215.846.263	100 %	24.066.612.199	
		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi umum	70%	42.000.000	-	-	-	100 %	6.850.000	100 %	7.990.000	100 %	20.309.000	100 %	610.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2021 (n- 5)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2022 (n-4)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2023 (n- 3)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2024 (n-2)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PDTW.II 2025		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab 11								
				1	2	3	4	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9	K	Rp	10	K
			perangkat daerah (%)																					
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Percentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)	100 %	47.672.158.89 5	-				7.375.889.000	100 %	7.412.898.934	100 %	9.453.123.202	100 %	3.438.663.036							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase BMD penunjang urusan pemerintah yang terpelihara dengan baik (%)	100 %	1.443.023.920	-				-	-	-	-	-	100 %	276.520.977	100 %	94.430.370						
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Percentase peningkatan pelayanan BLUD	22%	461.250.000.0 00	2%	94.147.345.533	7%	94.772.487.338	4%	87.311.857.479	26%	70.691.190.494	6%	31.684.327.141									
2.	Meningkat nya mutu pelayanan rumah sakit	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Percentase tingkat pemenuhan pengembang an SDMK (%)	62%	3.913.000.000	-				-	-	-	-	-	62%	620.156.667	39%	87.802.800						
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK	Percentase tingkat pemenuhan dan	100 %	3.913.000.000										100 %	620.156.667	39%	87.802.800						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2021 (n- 5)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2022 (n-4)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2023 (n- 3)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun 2024 (n-2)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PDTW.II 2025		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab 11								
				1	2	3	4	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9	K	Rp	10	K
		Tingkat Daerah Kab/Kota	pengembangan SDMK (%)																					
		<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)</i>	25,5 %	113.711.872.4 92	24%	59.510.159.000	31%	6.256.026.325	24,5 %	19.950.794.278	25%	36.030.083.482	98%	1.783.022.617									
		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/ kota	Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana, prasaranan dan alat kesehatan sesuai standar (%)	75%	44.092.385.47 2	73%	44.743.315.861	69,5 %	382.088.000	73%	1.151.521.000	73%	13.666.827.935	67,7 3	130.306.617									
		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/ kota	Persentase pasien rujukan yang dilayani (%)	100 %	66.037.487.02 0	100 %	14.766.843.139	98,7 %	5.873.938.325	100 %	18.799.273.278	100 %	22.363.255.547	100 %	1.652.716.000									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD I Lagaligo.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu sesuai standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakikatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka SKPD membuat laporan evaluasi atas rencana kerja yang dilaksanakan setiap periode pembangunan yang mengacu ke rencana stategis dan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB I Ayat 6 menyatakan: Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ayat 7: Indikator SPM adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besarnya sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan. Ayat 8: Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 PP RI No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit, diantaranya yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Cakupan Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berikut gambaran capaian kinerja rumah sakit sesuai Renstra RSUD I Lagaligo tahun 2021-2026 :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Renstra RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur
Periode 2021-2026

NO	Indikator	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (semester I)	Tahun 2026
		(thn n-5)	(thn n-4)	(tnn-3)	(thn n-2)	(thn-1)	(thn-n)	(thn n-5)	Thn n- 4)	Thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn-n)
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	93	93	93,5	94	94	82	90,3	94,5	96,59	86,39	
2.	Nilai SAKIP Hasil evaluasi internal Inspektorat	63	70	70,5	71	75	72	67,72	73,75	75	70,70	Belum Dinilai	-

Berikut penjelasan capaian indikator kinerja utama pada tabel 2.2 diatas :

Tahun 2025 adalah masa transisi dari rencana pembangunan periode 2021-2026 ke periode 2025-2029, dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahun 2026 menggunakan data realisasi semester I tahun 2025.

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang pada semester I tahun 2025 belum mencapai target, yaitu 86,39 atau katagori BAIK.

Secara standar nasional untuk indeks kepuasan Masyarakat dengan kategori baik nilai indeks kepuasan dengan nilai interval 3,064-3,532 atau nilai konversi 76,61-88,30. Sedangkan untuk kategori sangat baik, nilai indeksnya dengan nilai interval 3,532-4,00 atau nilai konversi 88,31-100,00.

Capaian indeks kepuasan Masyarakat ini diperoleh melalui penyabaran kuesioner dirumah sakit baik pada rawat inap maupun rawat jalan termasuk instalasi gawat darurat (IGD) dengan total responden sampai triwulan II tahun 2025 adalah 360 responden. Melalui Kerjasama yang baik dengan semua unsur baik staf professional dokter, paramedic, dan tim manajemen sehingga kepercayaan Masyarakat kembali dengan lebih cepat dari rencana target yang ditetapkan, selain itu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat baik sehingga membantu percepatan pencapaian kinerja sasaran ini.

2. Nilai Sakip hasil evaluasi internal Inspektorat pada tahun adalah sebesar 70,70 (BB) dengan Tingkat capaian 94,3% atau kategori Sangat Tinggi ($91 \leq 100\%$). Kondisi ini disebabkan adanya perbaikan pelaksanaan evaluasi oleh inspektorat sehubungan dengan telah dilaksanakannya coaching clinic oleh Menpan-RB. Dalam Menyusun dokumen akuntabilitas kinerja rumah sakit telah melakukan beberapa perbaikan, selain itu juga ada beberapa rekomendasi oleh inspektorat sebagai tim evaluasi kebupaten untuk yang ditindak lanjuti.

Selain itu ada beberapa data yang dapat ditampilkan rumah sakit untuk melihat kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD I Lagaligo, berikut gambarannya :

Tabel 2.3
Data Kinerja Layanan BLUD RSUD I Lagaligo
Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Instalasi GawarDarurat (IGD)	Kunjungan	15.324	12.500	14.314	9.002	8.750
2.	Instalasi GawarDarurat (IGD PONEK)	Kunjungan	-	-	-	3.237	3.313
3.	Rawat Jalan :		45.260	51.641	73.322	78.359	68.640
	1) Poli Anak 2) Poli Penyakit Dalam 3) Poli Kandungan 4) Poli Bedah 5) Poli Neuro 6) Poli THT 7) Poli Mata 8) Poli Kulit & Kelamin 9) Poli Jantung 10) Poli Gizi 11) Poli Paru 12) Poli Jiwa 13) Klinik Umum/ MCU 14) Periodonti 15) Penyakit Mulut 16) Orhodonti 17) Konservasi Gigi 18) Prostodonsia 19) Poli Bedah Mulut 20) Rehab Medik	Kunjungan	2.674 12.629 7.898 3.908 4.587 1.976 2.795 985 - 33 - - 3.819 - 159 367 1.539 15 - 1.876	2.948 12.070 10.921 5.073 6.897 769 3.374 1.241 - 8 - - 3.170 61 157 646 2.477 94 - 1.735	5.295 14.961 12.213 7.595 9.993 1.421 5.524 1.461 - 23 - - 3.842 2.222 365 521 4.327 414 - 3.145	5.961 12.866 10.987 7.169 8.994 3.105 5.640 1.723 2.670 21 - - 3.849 3.084 429 467 6.929 639 - 3.826	5.743 10.899 10.261 5.933 6.455 2.758 5.712 1.448 3.355 2 356 138 2.518 2.688 143 393 6.267 190 2.150 1.231
4.	Rawat Inap		12.149	11.922	16.864	17.606	18.540
	1) Kelas 3 2) Kelas 2 3) Kelas 1 4) VIP 5) ICU 6) Isolasi 7) NICU 8) Perinatologi	Hari Rawat	7.330 1.031 1.207 162 384 790 202 1.043	6.947 829 1.246 178 454 1.020 225 1.023	10.228 1.350 1.483 603 666 1.020 274 1.240	11.265 1.403 1.576 783 667 188 231 1.493	10.302 1.375 1.699 657 2.819 282 248 1.158
5.	Laboratorium	Pemeriksaan	74.916	93.576	101.359	-	84.722
6.	Radiologi	Pemeriksaan	9.300	13.493	16.596	-	12.882
7.	Farmasi	Resep	96.069	107.205	155.950	171.545	173.408
8.	Fisioterapi	Tindakan	114	-	-	-	2.975
9.	Hemodialisa	Tindakan	1.840	1.936	3.114	3.877	4.164
10.	Kamar Operasi	Tindakan	2.779	2.739	4.591	5.246	4.946

Berdasarkan data tabel diatas dapat digambarkan bahwa kunjungan pasien di IGD umum ada penurunan, dan untuk kunjungan IGD PONEK cendrung meningkat. Sedangkan kunjungan pelayanan rawat jalan setiap tahunnya meningkat namun tahun 2024 ada penurunan kunjungan akibat adanya beberapa pelayanan yang tidak optimal pelayanankarena dokter spesialisnya tidak tersedia/ dokternya berkurang. Untuk kunjungan rawat inap trend kunjungan pertahun meningkat, dan layanan penunjang sedikit berkurang karena adanya pengendalian pelayanan penunjang oleh kebijakan rumah sakit.

Total kunjungan pasien di RSUD I Lagaligo pada tahun 2024 (Rawat inap dan Rawat jalan) adalah 87.180 kunjungan dan kunjungan pada tahun 2023 adalah sebanyak 95.965 kunjungan, bahwa ada penurunan kunjungan yang disebabkan berkurangnya kunjungan poliklinik akibat ketersediaan dokter spesialis terbatas (kurang) sebanyak 8.785 atau **sebesar 9%**.

Table 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	144.354.522.620	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai dengan standar	100%	163.301.052.629	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	59.520.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	79.700.470	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	48.963.037.620	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	68.848.397.659	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	12.725.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	13.250.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	10.134.240.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	9.174.704.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik .	100%	185.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik .	100%	185.000.000	

	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase peningkatan pelayanan BLUD (%)	22%	85.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase peningkatan pelayanan BLUD (%)	22%	85.000.000.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)	25,5%	29.764.442.533	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)	25,5%	38.920.915.503	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit (%)	74,4%	7.410.139.521	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit (%)	74,4%	22.577.875.503	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase pasien rujukan yang dilayani (%)	98.8%	22.354.303.012	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase pasien rujukan yang dilayani (%)	98.8%	16.343.040.000	
	Peningkatan Kapasitas SDMK		Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDMK (%)	62%	710.900.000	Peningkatan Kapasitas SDMK		% Tingkat pemenuhan pengembangan SDMK	62%	711.241.060	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentasi tenaga kesehatan mengikuti pelatihan/ bimtek (%)	100%	710.900.000	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga SDMK tingkat daerah kab/ kota		Persentase tenaga kesehatan mengikuti pelatihan / bimtek	100%	711.241.060	

Dalam pengajuan jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui dan sangat tergantung akan kondisi keuangan daerah, sehingga SKPD harus benar-benar memprioritaskan program kegiatan untuk tahun 2026.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD awal terdapat 3 Program . Program tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renja RSUD I Lagaligo tahun 2026.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat membantu dalam mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan renja perangkat daerah 2026 mengakomodir program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun hasil pengumpulan informasi dari lapangan (kotak aduan dan survey kepuasan pasien) dan usulan saat musrembang.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan kesehatan pada Tahun 2026 merupakan transisi pelaksanaan tahun kedua RPJMD 2025-2029, fokus pembangunan diarahkan kepada penajaman pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD dan renstra rumah sakit. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan sesuatu yang ingin dicapai yang dirumuskan secara spesifik, realistik dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja beberapa tahun dan sampai dengan semester I tahun 2025 serta perumusan permasalahan dan tantangan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2026 baik internal maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan capaian Kinerja Perangkat Daerah, guna Keberlanjutan Pembangunan kesehatan maka tujuan dan sasaran RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur selama Periode 5 (lima) tahun terakhir masih dianggap relevan untuk dilanjutkan dan di perkuat pencapaiannya dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dan Renstra RSUD I Lagaligo Tahun 2025-2029.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2026-2030 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" Visi ini dijabarkan melalui empat pilar pembangunan: Pembangunan Manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Visi:

- "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".
- Mencakup tujuan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesehatan nasional merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam

lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Arah kebijakan kementerian kesehatan adalah :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, dan intervensi secara kontinyum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan pereventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksimulti sektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai cakupan kesehatan semesta (no one left behind).
5. Peningkatan sinergis melintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program dengan pendekatan keluarga (PIS PK).

Mengacu pada visi,misi Presiden ditetapkan 5 (lima) prioritas kerja presiden republic Indonesia dan dari prioritas tersebut ditetapkan isu strategis bidang kesehatan yaitu :

1. Stanting, AKI dan AKB
2. SistemJaminan Kesehatan Nasional
3. PenguatanPelayanan Kesehatan
4. Obat dan alat Kesehatan

RSUD I Lagaligo sebagai fasilitas kesehatan mendukung program prioritas bidang kesehatan penurunan angka kematian ibu dan anak dengan menyediakan pelayanan dan sarana prasarana kasus maternal neonatal (PONEK).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD I Lagaligo

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan, juga dapat menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan untuk lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RSUD I Lagaligo menetapkan tujuan untuk 2026 adalah ***“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit”***.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan. tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Penetapan indikator sasaran RSUD I Lagaligo secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas. Sasaran pembangunan RSUD I Lagaligo kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah indicator Nilai SAKIP hasil evaluasi internal inspektorat.

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah RSUD I Lagaligo Kab.Luwu Timur periode tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel.3.1
Tujuan dan Sasaran Renja RSUD I Lagaligo Tahun 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya mutu pelayanan RS	1. Akreditasi RS Tingkat Tertinggi 2. Pemenuhan SPM rumah sakit	Paripurna (4) 90%
			Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72 (BB)

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2026 RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur merencanakan 3 program dengan 9 kegiatan, dan 14 subkegiatan, yang terdiri dari 2 program utama dengan 3 kegiatan, 6 sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 1 program pendukung dengan 6 kegiatan dan 8 subkegiatan yang menunjang tugas kesekretariatan agar fungsi organisasi SKPD dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Utama/ Teknis

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - 1) Penyedian fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/ kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya.
 - Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.
 - Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.
 - Pengembangan rumah sakit.
 - 2) Penyedian layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/ kota, dengan sub kegiatan :
 - Operasional pelayanan rumah sakit
 - b. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1) Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga SDMK tingkat daerah kab/ kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendukung/ Rutin :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyedian gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran skpd
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penatausahaan arsip dinamis
 - 4) Penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - Penyedian jasa pelayanan umum kantor
 - 5) Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Dari program-program tersebut dapat diimplementasikan dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD I LAGALIGO TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
I.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD I LAGALIGO	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)	25,5%	35.646.212.408	APBD		30%	35.042.063.701
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Percentase ketersediaan sarana,prasarana dan alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit (%)	74%	19.303.172.408			75%	18.100.000.000
01.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	3 Unit	1.797.116.830			1 Unit	2.950.000.000
02.	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	102 Unit	7.724.385.550			110 Unit	10.050.000.000
03.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	31 unit	705.000.000			30 unit	1.600.000.000
04.	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai jenis pelayanan	2 Unit	9.076.670.028			1 Unit	3.500.000.000

			rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah pendudukan minimal 1 : 1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)					
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pasien rujukan yang dilayani (%)	98.6%	16.343.040.000		98.6%	16.942.063.701
01.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	7 Dokumen	16.343.040.000		7 Dokumen	16.842.063.701
02.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (unit)	1 unit	0		1 unit	100.000.000
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase tenaga kesehatan mengikuti pelatihan/bimtek	100%	711.461.060		100%	961.700.000
1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	100%	711.461.060		100%	961.700.000

01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	75 Orang	711.461.060			100 Orang	961.700.000
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	163.275.535.724			100%	167.092.510.332
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	79.720.470			100%	73.663.750
01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	1 Laporan	29.632.680			1 Laporan	23.663.750
02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	8 Dokumen	50.087.790			8 Dokumen	50.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Percentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	68.822.860.754			100%	71.269.606.582
01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang)	345 Orang	68.796.634.754			405 Orang	71.249.606.582
02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	7 Dokumen	26.226.000			7 Dokumen	20.000.000

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Percentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	80%	13.250.000			85%	15.000.000
01.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5 Dokumen	13.250.000			5 Dokumen	15.000.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	9.174.704.500			100%	10.534.240.000
01.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.174.704.500			2 Laporan	10.534.240.000
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	185.000.000			100%	200.000.000
01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 Unit	185.000.000			32 Unit	200.000.000
6.	Peningkatan Pelayanan BLUD		Percentase peningkatan pelayanan BLUD (%)	18.5%	85.000.000.000			20%	85.000.000.000
01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)	1 Unit Kerja	85.000.000.000			1 Unit Kerja	85.000.000.000
T O T A L					199.633.209.192				199.633.209.192

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2026 RSUD I Lagaligo merencanakan 3 program dengan 9 kegiatan, dan 14 subkegiatan dengan pagu indikatif awal Rp. 174.829.865.153,-. Dan pagu akhir Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2026 RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah Rp. 199.633.209.192,-, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan RSUD I Lagaligo
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Sumber Dana
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	RSUD I LAGALIGO	100%	163.275.535.724	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100%	79.700.470	APBD
01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)		1 Laporan	29.612.680	APBD
02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah (Dokumen)		8 Dokumen	50.087.790	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		100%	68.848.397.659	APBD
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang)		345 Orang	68.822.491.659	APBD
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		7 Dokumen	25.906.000	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)		80%	13.250.000	APBD
01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		5 Dokumen	13.250.000	APBD

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100%	9.174.704.500	APBD
01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	9.174.704.500	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100%	185.000.000	APBD
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		32 Unit	185.000.000	APBD
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD (%)		18.5%	85.000.000.000	BLUD
01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)		1 Unit Kerja	85.000.000.000	BLUD
II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	RSUD I LAGALIGO	25,5%	35.646.212.408	APBD
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan yang dilayani (%)		98.6%	16.343.040.000	APBD
01	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit		7 Dokumen	16.343.040.000	APBD
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit (%)		74,4%	19.303.172.408	APBD
01	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar		1 Unit	1.797.116.830	APBD
02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		11 Unit	7.724.385.550	APBD
03	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		31 unit	705.000.000	APBD
04	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah pendudukan minimal 1 : 1000 dan/atau		1 Unit	9.076.670.028	APBD

		dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)				
III. -	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan mengikuti pelatihan/bimtek	RSUD I LAGALIGO	100%	711.461.060	APBD
10.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		100%	711.461.060	APBD
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		75 Orang	711.461.060	APBD
JUMLAH TOTAL					199.633.209.192	APBD+BLUD

BAB V

P E N U T U P

Rencana kerja RSUD I Lagaligo Tahun 2026 merupakan pelaksanaan rencana strategis periode renstra 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur yang kami susun. Dalam Rencana kerja ini termuat program, Kegiatan, Sasaran serta indikator yang akan dilaksanakan RSUD I Lagaligo pada tahun 2026.

Rencana kerja ini dijadikan sebagai dasar pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan bagi RSUD I Lagaligo sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat yang terukur dan akuntabel meskipun pagu anggaran masih dapat berubah karena menyesuaikan hasil pembahasan di tingkat DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 RSUD I Lagaligo ini dibuat seoptimal mungkin. Namun kami menyadari dengan segala keterbatasan, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana ini, oleh karenaitu saran dan kritik membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan kegiatan dalam rencana ini sesuai harapan, untuk perbaikan pada tahun berikutnya sehingga visi menjadi Rumah Sakit Rujukan dengan Pelayanan Profesional dan Bermutu dapat terwujud.

Watu, Juli 2025

Direktur,

dr. IRFAN, Sp.PK

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197601012006041034